

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kulonprogo

1. Visi dan Misi Kabupaten Kulonprogo

a. Visi Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kulon Progo saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Kabupaten maka Visi Kabupaten Kulon Progo seperti yang tertera dalam RPJP Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 adalah:¹

"MASYARAKAT KABUPATEN KULON PROGO YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN"

Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kulon Progo dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

b. Misi Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025

¹ Lampiran Perda Kab. Kulon Progo No. 16 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila.
- 2) Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing.
- 3) Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum.
- 4) Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu.
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
- 6) Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari.
- 7) Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri.
- 8) Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional.

Untuk mewujudkan delapan misi tersebut diperlukan kelembagaan pemerintahan yang kokoh, efektif dan efisien, didukung kualitas aparatur yang profesional dan berjiwa kewirausahaan (enterpreneurship).

c. Visi Pembangunan Jangka Menengah 2011-2016

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa"

Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut :

- 1) Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, baik sehat jasmani, rohani maupun sehat dalam pengertian masyarakat mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman. Demikian juga lima tahun kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan prima, dengan prinsip transparan, dan akuntabel. (SEHAT)
- 2) Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan masyarakat serta wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri. (MANDIRI)
- 3) Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan baik pendidikan formal bagi maupun non formal bagi seluruh masyarakat. Terpenuhinya pendidikan formal bagi seluruh penduduk usia sekolah merupakan prasyarat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia di masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan non formal merupakan elemen pendukung bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan agar mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi. Selain itu, pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan dan

masyarakat yang mampu berinovasi dengan etos kerja tinggi sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah berdaya saing tinggi. (BERPRESTASI)

- 4) Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat dinikmati seluruh masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan (ADIL)
- 5) Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu keadaan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melanjutkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan. (AMAN)
- 6) Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan secara layak. (SEJAHTERA)
- 7) Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan. (BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA)

d. Misi Pembangunan Jangka Menengah 2011-2016

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 yaitu Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil,

aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa maka dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan
- 2) Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance
- 3) Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat
- 4) Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah
- 5) Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan
- 6) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum

2. Kondisi Geografis

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat, dengan ibukota di

Wates. Secara administratif terdiri dari 12 kecamatan, 87 Desa, 1 Kelurahan, 918 Pedukuhan, 1.825 Rukun Warga dan 4.469 Rukun Tetangga. Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo ialah 586.627,512 ha dengan rincian menurut kecamatan.

Selanjutnya batas-batas administrasi Kabupaten Kulon Progo bagian utara dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, bagian timur dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, bagian selatan dengan Samudera Indonesia dan bagian barat dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Kulon Progo terletak diantara $7^{\circ}38'30''$ - $7^{\circ}58'3''$ LS dan $110^{\circ}1'37''$ - $110^{\circ}16'26''$ BT. Posisi *geostrategic* Kabupaten Kulon Progo terletak di bagian barat DIY dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, merupakan 'pintu gerbang' DIY yang menghubungkan dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang terletak dengan bagian barat, utara dan timur Pulau Jawa. Hal ini karena adanya jalur utama darat Jalan Negara Lintas Selatan Pulau Jawa dan jalur kereta api yang menghubungkan dengan kota besar Pulau Jawa, antara lain: Bandung, Jakarta dan Surabaya.

Selain itu posisi Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia juga sebagai 'pintu gerbang' yang menghubungkan melalui laut Daerah Istimewa Yogyakarta dengan daerah-daerah di Indonesia dan negara lain. Posisi *geostrategic* ini, memberikan

keuntungan bagi perkembangan wilayah kabupaten maupun perkembangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan kondisi fisik wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi tiga kawasan yaitu :

1) Kawasan pesisir

Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur, dan sebagian Kecamatan Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0–2%, merupakan wilayah pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 24,8 km.

2) Kawasan dataran

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih dan sebagian Kecamatan Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng antara 2–15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.

3) Kawasan pegunungan

Merupakan dataran tinggi/ perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1.000 meter dari permukaan air laut, meliputi wilayah Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kokap, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang.

c. Potensi Air Tanah

Kabupaten Kulon Progo mempunyai potensi air tanah yaitu Cekungan Air Tanah (CAT) tersendiri yang tidak melampar ke wilayah kabupaten lain yaitu Cekungan Wates dengan potensi air tanah bebas sejumlah 38.000.000 m³/tahun. Selain Cekungan Air Tanah (Cekungan Wates), sumber mata air lainnya dapat dilihat pada (tabel 2.01) berikut:

Tabel 2.1
Sumber Mata Air di Kabupaten Kulon Progo dan Cekungan Air Tanah Wates

No	Sumber	Lokasi (kecamatan)	Debit (L/d)	Pemanfaatan
1	Mata air Clereng	Pengasih	100-300	Sudah/PDAM
2	Tuk Mudal	Girimulyo	5-15	Sudah
3	Tuk Gua Grembul	Girimulyo	24-60	Belum
4	Tuk Grembul	Kalibawang	5-10	Sudah/PDAM
5	Tuk Gua Upas	Samigaluh	1,5-3,5	Sudah/PDAM
6	Mata air Sekepyar dan Kayangan	Samigaluh	-	Belum
7	Tuk Mudal Anjir	Pengasih	3-11	MCK
8	Cekungan Air Tanah Wates*	Pengasih, Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh, Nanggulan	30.000.000	Belum

Sumber : - *Bappeda, DPU, PDAM Kab. Kulon Progo, 2010*

-**Departemen ESDM, 2010*

d. Klimatologi

Curah hujan dan hari hujan diukur menurut 5 stasiun hujan (Gejagan, Singkung, Gembongan, Beji, Brosot) di Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kuloprogo termasuk dalam sub DAS Progo Hilir dengan tipe iklim Am, Aw, dengan curah hujan tahun 2007-2012 sebesar 117 mm/hari

sampai 190 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan berkisar dari 7-12 hari dalam sebulan.

Secara umum curah hujan dan hari hujan mengalami fluktuasi dari tahun ketahun, dengan kecenderungan mengalami naik turun dalam tiap tahun. Curah Hujan dan Hari Hujan tinggi terjadi pada bulan Januari - April dan Nopember- Desember tiap tahunnya. Hal ini terjadi karena bulan-bulan tersebut merupakan musim penghujan.

3. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032. Penggunaan lahan kawasan terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

a. Kawasan Lindung

Kondisi kawasan lindung secara *existing* penggunaannya paling besar untuk kawasan lindung pertanian lahan kering seluas 12.434,44 ha (21,20%). Luas pertanian lahan kering mayoritas berada di Kecamatan Samigaluh seluas 4.299,59 ha. Jenis penggunaan lahan dengan luasan terkecil di dalam kawasan lindung hutan seluas 59,241 ha atau 0,10% dari luas wilayah Kabupaten Kulon Progo. Hutan mayoritas berada di Kecamatan Kokap seluas 22,539 ha (0,31%). Dengan melihat kondisi *existing* kawasan lindung, diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang untuk budidaya di kawasan lindung guna kelestarian sumber daya alam

dengan penetapan Hutan Fungsi Lindung di Kecamatan Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh dan Kokap serta penetapan kawasan resapan air.

b. Kawasan Budidaya

Berdasarkan hasil analisis peta penggunaan lahan dari RTRW Kabupaten Kulon Progo, sebagian besar jenis penggunaan kawasan budidaya merupakan pertanian lahan kering seluas 19.369,15 ha atau 33,04%, pemukiman 18,52% dan sawah 16,57%. Mayoritas lahan pemukiman terdapat di Kecamatan Wates, Pengasih, Panjatan, Galur Sentolo. Wilayah pemukiman tersebut, juga yang diikuti dengan perbandingan lurus luas lahan sawahnya.

4. Kondisi Demografi

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2000-2013 berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) secara umum mengalami pertumbuhan pada Tahun 2000 sebanyak 442.185 jiwa dengan perbandingan laki-laki 48,80% dan wanita 51,20%, menjadi pada 2013 sebanyak 416.209 jiwa dengan perbandingan laki-laki 49,63% dan wanita 50,37%.

Namun pada tahun 2010 dan 2013 secara administratif jumlah penduduk mengalami penurunan yang disebabkan pada tahun 2010 dilaksanakan pemutakhiran data penduduk dan pada tahun 2013 jumlah penduduk ditetapkan sesuai dengan hasil *updating* data terkait perekaman

E-KTP oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga tidak terjadi duplikasi identitas penduduk di tempat lain dan penduduk yang telah meninggal teradministrasi. Jumlah penduduk secara administratif tersebut pada tahun 2013, bahkan lebih rendah dari angka tahun 2000 atau mengalami penurunan penduduk rata-rata 0,45% per tahun.

Jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan kebutuhan akses layanan terutama kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk kabupaten pada Tahun 2013 dengan rata-rata 709,93 jiwa/km². Kecamatan Wates merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi sebesar 1.420,03 jiwa/km²), tiga kali lebih padat dibanding Kecamatan Kalibawang yang memiliki kepadatan terendah 420,52 jiwa/km². Kecamatan Lendah dan Galur meskipun dari sisi jumlah penduduknya tidak sebanyak Kecamatan Sentolo dan Pengasih, namun kepadatannya penduduknya lebih tinggi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi di Kabupaten Kulon Progo sejak Tahun 2000 yaitu: Kecamatan Wates, Lendah dan Galur.

c. Penduduk Menurut Umur

Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 sebanyak 33,45% merupakan penduduk usia non-produktif, yang terdiri dari 90.319 penduduk usia muda (0-14 tahun) dan 48.900 penduduk usia tua (di atas 65 tahun). Sedangkan angka *dependency ratio* penduduk sebesar 50,26, yang berarti setiap 100 orang usia produktif harus menanggung 50 orang usia non-

produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia non-produktif, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2013 lebih banyak dibanding usia non-produktif baik tua maupun muda. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi sumber daya manusia yang besar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Kabupaten Kulon Progo.

Pada Tahun 2000 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo mencapai 442.185 jiwa, jumlah ini meningkat sebanyak 28.335 jiwa dalam 10 tahun. Dari gambaran jumlah penduduk tersebut, maka selanjutnya dapat dilakukan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo secara menyeluruh dengan berbasis pada updating data kependudukan Tahun 2013 sebanyak 416.209 jiwa dengan pertumbuhan per tahun 0,64%, maka pada akhir RPJMD tahun 2016 diprediksikan jumlah penduduk akan mencapai 424.152 jiwa, dengan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Pengasih sebanyak 49.582 jiwa, Kecamatan Sentolo sebanyak 48.668 jiwa dan Kecamatan Wates sebanyak 47.363 jiwa.

5. Kondisi Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo tahun 2013 yang diukur dengan pertumbuhan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami pertumbuhan sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013

ini paling tinggi dibanding 5 tahun terakhir, yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007- 2013

No	Tahun	Nilai (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan
1	2007	1.587.630	4,12
2	2008	1.662.630	4,71
3	2009	1.728.304	3,97
4	2010	1.781.227	3,06
5	2011	1.869.338	4,95
6	2012	1.963.079	5,01
7	2013	2.062.180	5,05

Sumber : *BPS Kabupaten Kulon Progo, 2013*

Peningkatan laju pertumbuhan ini juga diikuti dengan peningkatan pendapatan per kapita atas dasar harga konstan dengan laju pertumbuhan 3,88% per tahun yaitu dari Rp.4.239.954,- tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 5.229.120,- tahun 2013. Sedangkan apabila dilihat dengan pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku (dipengaruhi inflasi) dengan nilai Rp. 7.138.195,- pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 11.770.580,- pada tahun 2013.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007-2013 masih di bawah DIY dan Nasional. Pada tahun 2009 secara nasional cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan, sedangkan tahun selanjutnya cenderung mengalami percepatan pertumbuhan. Namun, di

Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010 mengalami perlambatan pertumbuhan yang besar, bahkan pertumbuhan terendah sepanjang 5 tahun. Hal ini disebabkan kontribusi yang besar pada penurunan produktivitas sektor pertanian, karena gagal panen akibat erupsi Merapi.

Sedangkan dilihat dari pertumbuhan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo dalam tahun 2007-2012 sebesar 4,41%, masih dibawah rata-rata DIY sebesar 4,86% dan rata-rata Nasional sebesar 5,83%. Pertumbuhan ekonomi bila dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota hanya lebih tinggi dibanding Kabupaten Gunungkidul.

Secara rinci perbandingan laju pertumbuhan ekonomi digambarkan tabel sebagai berikut.

Tabel 2.3

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten/Kota di DIY dan Nasional Tahun 2007- 2012

No	Wilayah	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	Kabupaten Kulon Progo	4,12	4,71	3,97	3,06	4,95	5,01	4,30
2	Kabupaten Bantul	4,52	4,90	4,47	4,97	5,27	5,34	4,91
3	Kabupaten Gunung Kidul	3,91	4,39	4,14	4,15	4,33	4,84	4,29
4	Kabupaten Sleman	4,61	5,13	4,48	4,49	5,19	5,45	4,89
5	Kota Yogyakarta	6,76	5,12	4,46	4,98	5,64	5,76	5,45
6	DIY	4,31	5,03	4,43	4,88	5,17	5,32	4,86
7	Nasional	5,67	5,74	4,77	6,14	6,35	6,30	5,83

Sumber : *BPS Kabupaten Kulon Progo, 2013*

Perekonomian Kabupaten Kulon Progo tahun 2007-2013 selalu mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan selalu positif. Pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2010 di sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian, disebabkan adanya erupsi Gunung Merapi sehingga terjadi penurunan produksi pertanian dan penurunan kegiatan penggalian pasir dan batu.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 dilihat dari sembilan sektor yang ada dalam PDRB, seluruh sektor tumbuh positif. Kontribusi pertumbuhan terbesar didukung sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh 11,89% dan yang tumbuh terendah sektor pertanian yang tumbuh 1,81%.

Selanjutnya dibandingkan dengan tahun 2012, laju pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2013 sedikit melambat dengan laju pertumbuhan sebesar 1,81%. Perlambatan pada sektor ini disebabkan oleh penurunan produktivitas tanaman bahan makanan antara lain disebabkan alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian. Subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan dan hasil-hasilnya, serta subsektor kehutanan mengalami pertumbuhan yang melambat di tahun 2013. Namun perlambatan tersebut, tidak sampai menunjukkan pertumbuhan yang negatif.

Sementara itu, subsektor perikanan masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 6,35% karena adanya kenaikan

produksi hasil perikanan yang salah satunya dipengaruhi oleh faktor cuaca yang mendukung untuk menangkap ikan di perairan laut.

Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 2,23% pada tahun 2013. Sektor konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 9,59%, sedikit melambat seiring dengan peningkatan produksi di sektor pertanian dan sektor pertambangan penggalan, serta semakin bertambahnya usaha sektor industri pengolahan berdampak pada peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan sektor ini sebesar 5,78%, lebih lambat dibandingkan pada tahun 2011 yang tumbuh lebih pesat yakni 5,28%. Sektor pengangkutan dan komunikasi yang mengalami pertumbuhan hanya 3,20%.

Sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan cukup pesat sebesar 8,74% setelah pada tahun 2012 hanya mampu tumbuh 5,00%. Sektor jasa-jasa terus mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun 2013 menjadi 8,69%.

Sektor pertambangan dan penggalan, sektor konstruksi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa serta sektor listrik, gas, dan air bersih adalah sektor yang laju pertumbuhannya di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kulon Progo. Sementara empat sektor lainnya mencapai pertumbuhan di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kulon Progo.

b. Permasalahan Ekonomi

Pada tahun 2011, pada tahun 2012 sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja sektor pertanian, yaitu mencapai 44,18%. Hal ini karena Kabupaten Kulon Progo termasuk sebagai daerah agraris yang sebagian besar penduduknya hidup bekerja di sektor pertanian. Sektor berikutnya yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan, rumah makan dan hotel, sektor industri pengolahan dan sektor jasa. Ketiga sektor tersebut mengalami kenaikan dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor industri pengolahan, sektor keuangan dan sektor jasa. Persentase penduduk yang bekerja di sektor industri meningkat dari 15,28% pada tahun 2011 menjadi 16,81% pada tahun 2012, sektor keuangan dari 1,96% pada tahun 2011 menjadi 2,22% pada tahun 2012 dan sektor jasa dari 13,17% naik menjadi 14,10%. Sedangkan sektor lainnya daya serapnya kurang dari 5%.

Indikator kemajuan ekonomi yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan perkapita tersebut, belum dapat dinikmati oleh penduduk secara merata yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kemiskinan. Hal ini berkaitan dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian yang memberikan tingkat pendapatan yang rendah. Pendapatan yang diterima oleh pekerja sektor pertanian sebanyak 44,18% dari total tenaga kerja mempunyai tingkat pendapatan atas dasar harga berlaku (PDRB/tenaga kerja) Rp.4,5 juta, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pendapatan tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo (Rp 10,6 juta).

Ketidakmerataan kesejahteraan juga terjadi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Masalah ekonomi lain yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo adalah rendahnya daya saing investasi. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi nilai PMDN sebesar 1,58% dari nilai PMDN Provinsi DIY dan realisasi nilai PMA sebesar 0,09% dari nilai PMA Provinsi DIY. Pada tahun 2008, tingkat realisasi investasi di Kabupaten Kulon Progo juga rendah. Realisasi nilai PMDN hanya 11,19% dari nilai PMDN yang direncanakan dan realisasi nilai PMA hanya 0,18% dari nilai PMA yang direncanakan. Rendahnya daya saing investasi ini dapat dihubungkan dengan kualitas pelayanan penanaman modal.

Penelitian KPPOD tahun 2009 tentang kualitas pelayanan penanaman modal terutama aspek kualitas aspek perijinan investasi dan sistem informasi dengan membuat peringkat indeks kualitas pelayanan penanaman modal kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo menempati peringkat ke 83 dari 217 Kabupaten di Indonesia. Sebagai perbandingan, Kabupaten Bantul mendapat peringkat 12, Kabupaten Sleman mendapat peringkat 16 dan Kabupaten Gunung Kidul mendapat peringkat 40. Sementara pada kelompok kota, Kota Yogyakarta menempati peringkat pertama dari 74 kota di Indonesia. Upaya meningkatkan daya saing daerah, dilakukan pelayanan investasi dengan implementasi aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan pengembangan Kawasan Industri

Sentolo yang mulai tahun 2014 sudah dimulai pembangunan konstruksi industri, serta pembangunan *smelter* dalam rangka pengolahan bijih besi baja di Karangwuni.

Mengingat permasalahan investasi yang telah dikemukakan maka memasuki fase RPJMD II tahun 2011 – 2016 yang ditandai dengan harapan Gubernur yang menyatakan bahwa “Pertumbuhan perekonomian di wilayah DIY akan sangat bergantung pada Kulon Progo. Ini tidak lepas dari megaproyek yang berada di Kabupaten Kulon Progo, antara lain bandara internasional dan pelabuhan perikanan”. Pernyataan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Provinsi DIY yang mendukung program megaproyek dalam upaya menarik investasi di Kulon Progo untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan harapan tersebut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah meluncurkan “*Kulon Progo The Jewel of Java*” sebagai *brand* promosi investasi yang mengedepankan Kulon Progo sebagai kawasan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diharapkan mampu mewadahi investasi strategis, mencakup investasi infrastruktur dasar, bandara internasional, pelabuhan perikanan, kawasan industri, serta kawasan ekonomi khusus.

6. Kesehatan

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun yang menggambarkan

keadaan sosial ekonomi masyarakat. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merupakan probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. AKHB dihitung dengan bayi yang hidup dikurangi jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan angka fluktuatif yang masih di bawah 20 kematian bayi tiap 1.000 kelahiran hidup. Angka ini masih di bawah target, lebih baik dari AKI Nasional. AKHB terus mengalami peningkatan pada tahun 2006 sebesar 985,78 meningkat menjadi 987,88 di tahun 2012. (Tabel. 2.04).

Tabel 2.4

Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2012

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah kematian bayi <1	84	107	71	95	56	73	69
2	Jumlah kelahiran hidup	5.909	5.446	5.538	5.976	5.717	5.702	5.695
3	Angka kematian bayi (IMR)	11,6	19,65	12,82	15,90	9,80	12,80	12,22
	Angka Keberlangsungan Hidup Bayi	985,78	980,35	986,96	984,10	990,20	987,20	987,88

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013

b. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah. AHH Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan penduduk. Pada Tahun 2007 sebesar 73,74 tahun meningkat menjadi 74,58 tahun pada Tahun 2012.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di DIY pada tahun 2012, Angka Harapan Hidup Kulon Progo sebesar 74,58 tahun berada di peringkat dua setelah Kabupaten Sleman sebesar 75,29 tahun. Angka ini juga lebih besar dari rata-rata DIY sebesar 73,32 tahun dan rata-rata nasional 69,98 tahun.

c. Persentase Gizi Buruk

Jumlah balita yang mengalami gizi buruk sepanjang Tahun 2006-2013 selalu mengalami penurunan dari 1,24% menjadi 0,62%. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya jumlah bayi gizi buruk tertangani sehingga status gizinya membaik, yang mengindikasikan adanya peningkatan kualitas kesehatan bayi di Kabupaten Kulon Progo.

7. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kulon Progo dalam penelitian ini adalah pemerintah Daerah pada periode 2011-2016 yang di pimpin oleh seorang Kepala Daerah bernama Hasto Wardoyo. Pada masa kepemimpinan beliau Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan angka kemiskinan terutama kemiskinan pangan.

Dengan beberapa kebijakan dan program ketahanan pangan yang di terapkan di Kabupaten Kulon Progo seperti Bela & Beli Kulon Progo, pelajar dan PNS wajib mengenakan batik gebleg renteng khas Kulon Progo ternyata mampu menurunkan angka kemiskinan pada Kabupaten Kulon Progo ini. Selain itu, terbukanya lapangan pekerjaan yang luas berkat kebijakan yang pro pangan lokal.

Melalui kebijakan ketahanan pangan ini serta dengan semangat pemerintah yang fokus terhadap pangan lokal Pemerintah Kulon Progo menjadi Pemerintah yang baik dalam program pangan lokalnya.

B. Profil Kondisi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian

Perikanan Kehutanan

1. Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian

Perikanan Kehutanan

a. Visi

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya Ketahanan Pangan yang mandiri dan berkelanjutan didukung dengan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan yang profesional”

Penjelasan dari visi tersebut adalah:

- 1) Ketahanan Pangan yang mandiri dan berkelanjutan adalah Kabupaten Kulon Progo mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan secara aman, merata dan terjangkau.
- 2) Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang profesional adalah seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan yang dilaksanakan sesuai dengan standart dan kebutuhan.

b. Misi

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Misi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut:

Misi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Tahun 2011 – 2016 adalah :

“Mewujudkan peningkatkan ketahanan pangan didukung dengan penyuluhan pertanian perikanan kehutanan yang profesional.”

2. Kedudukan

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan salah satu SKPD di Kabupaten Kulon Progo berkedudukan sebagai Aselon III yang berwenang atas Ketahanan Pangan Kabupaten Kulon Progo.

3. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan kegiatan ketahanan pangan;
- 2) Melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan dan program penyuluhan;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengkajian teknologi; dan
- 4) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

b. Fungsi

Fungsi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Tugas dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo selanjutnya dijabarkan ke dalam 1 (satu) Subag Tata Usaha, 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2012 sebagai berikut :

- a) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penyusunan program kerja dan laporan.

- b) Seksi Ketahanan Pangan

Seksi Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, analisis dan pengendalian ketahanan pangan.

- c) Seksi Kelembagaan dan Program

Penyuluhan

Seksi Kelembagaan dan Program Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan petani dan perencanaan program penyuluhan.

- d) Seksi Pengkajian Teknologi

Seksi Pengkajian Teknologi mempunyai tugas memantau perkembangan penerapan paket teknologi untuk meningkatkan intensifikasi usaha tani dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan.

e) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang Jabatan Fungsional yang dikoordinir oleh Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah, Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan merupakan SKPD eselon III a yang memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Ketahanan Pangan;
- 4) Seksi Kelembagaan dan Program Penyuluhan;
- 5) Seksi Pengkajian Teknologi; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Kelompok jabatan fungsional yang berada di Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 sebagai berikut:

- 1) Penyuluh Pertanian
- 2) Penyuluh Kehutanan
- 3) Penyuluh Perikanan
- 4) Pengawas Mutu Hasil Pertanian

d. Sumber Daya SKPD

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kantor KP4K didukung oleh Pegawai Negeri Sipil dengan kondisi sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pegawai Kantor KP4K Kabupaten Kulon Progo
menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Uraian	Pria (Orang)	Wanita (Orang)	Jumlah (Orang)
Eselon III	1	-	1
Eselon IV	3	1	4
Penyuluh Pertanian	47	5	52
Penyuluh Kehutanan	15	1	16
Penyuluh Perikanan	9	4	13
Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1	1	2
Fungsional Umum (Staf)	11	4	15
Jumlah	87	16	103

Sumber : Renstra KP4K Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.6
Pegawai Kantor KP4K Kabupaten Kulon Progo
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
SD	0
SMP	0
SLTA	19
Diploma I/II/III	24
Sarjana/Diploma IV	57
Pasca Sarjana	3
Jumlah	103

Sumber : Renstra KP4K Kabupaten Kulon Progo

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kantor KP4K didukung juga didukung oleh pegawai non PNS yaitu Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebanyak 62 orang.